

## Demokrasi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

Nurul Bariyah \*

Universitas Tanjungpura  
nurul.bariyah@ekonomi.untan.ac.id

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

**Diterima:**

13-09-2021

**Disetujui:**

11-02-2022

**Kata kunci:**

demokrasi  
ketimpangan  
regresi  
Gini

---

### ABSTRAK

Konsep demokrasi dan ketimpangan pendapatan telah menjadi topik kajian dari banyak ahli ekonomi di seluruh dunia, baik secara sendiri maupun dalam hubungannya dengan konsep-konsep lain dalam bidang ekonomi. Jika dilihat dari Sila Kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, maka keadilan adalah pemerataan atau *equality* dalam memperoleh pendapatan yang adil, sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Indeks Demokrasi Indonesia terhadap Ketimpangan Pendapatan pada 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2009 sampai 2019. Indeks Demokrasi diteliti melalui ketiga aspeknya (Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, dan Lembaga Demokrasi), dan Ketimpangan Pendapatan diukur dengan Indeks Gini Indonesia. Pengaruh IDI terhadap IGI dianalisis dengan menggunakan *Fixed Effect Model* dengan menggunakan data yang dikutip dari sumber resmi Biro Pusat Statistik. Hasil estimasi Regresi Linier Berganda menunjukkan bahwa 15 provinsi memperoleh nilai positif di mana kenaikan IDI diikuti kenaikan IGI dan 19 provinsi menunjukkan nilai negatif yang berarti kenaikan IDI tidak diikuti kenaikan IGI (Ketimpangan Pendapatan). Disagregasi indeks demokrasi dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keterkaitan kebebasan sipil, hak politik dan kelembagaan demokrasi dengan ketimpangan pendapatan, sehingga dapat diformulasikan kebijakan yang tepat untuk mengatasi ketimpangan pendapatan di Indonesia.

### ABSTRACT

*Democracy and Income Inequality in Indonesia.* The concept of democracy and income inequality has become a topic of study by many economists around the world, both in isolation and in conjunction with other concepts in the field of economics. The fifth principle of Pancasila states "Social justice for all Indonesian people". When viewed from the aspect of income, justice means equality. This study aims to analyze the effect of the Indonesian Democracy Index on Income Inequality in 34 provinces in Indonesia from 2009 to 2019. The Democracy Index is examined through its three aspects (Civil Liberties, Political Rights, and Democratic Institutions), and Income Inequality is measured by the Indonesian Gini Index. The effect of IDI on IGI was analyzed by using the Fixed Effect Model using data quoted from official sources, which is the Central Bureau of Statistics. The results of the Multiple Linear Regression estimation show that 15 provinces get a positive value where the rise in IDI is followed by a rise in IGI and 19 provinces show a negative value which means that the rise in IDI is not followed by a rise in IGI (Income Inequality). The disaggregation of the democracy index in this study is expected to provide a clear picture of the relationship between civil liberties, political rights and democratic institutions with income inequality, so that appropriate policies can be formulated to address income inequality in Indonesia.

---

**Received:**

13-09-2021

**Accepted:**

11-02-2022

**Keywords:**

democracy  
inequality  
regression  
Gini

---

Copyright © 2022 (Author). All Right Reserved

**How to Cite:** Bariyah, Nurul. (2022). Demokrasi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mimbardemokrasi*, 21(2), 53-64. DOI: <http://dx.doi.org/10.21009/jimd.v21i2.23071>



*This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.*

## Pendahuluan

Konsep demokrasi dan ketimpangan pendapatan telah menjadi topik kajian dari banyak ahli ekonomi di seluruh dunia, baik secara sendiri maupun dalam hubungannya dengan konsep-konsep lain dalam bidang ekonomi. Sejumlah penelitian yang berfokus pada efek ketidaksetaraan ekonomi, di antaranya adalah Acemoglu & Robinson (2011) yang berpendapat bahwa demokratisasi lebih mungkin terjadi ketika ketimpangan berada pada tingkat menengah, sedangkan Boix (2015) menunjukkan bahwa demokratisasi lebih mungkin terjadi ketika ketimpangan rendah

Ketimpangan pendapatan di satu sisi berpengaruh besar pada keamanan dan kesejahteraan sosial masyarakat, misalnya pada angka kriminalitas (Maryanti, 2019).

Selain itu di satu sisi, ketimpangan pendapatan dapat mendistorsi demokrasi dalam hal respons institusi dan pelaku politik terhadap mereka yang memiliki tingkat pendapatan yang berbeda-beda (Goffe & Monusova, 2019). Sementara di sisi lain, distorsi politik berpengaruh besar terhadap modal sosial yang merupakan dasar dari penguatan masyarakat sipil. Modal sosial yang dimiliki bersama ini pada gilirannya akan sangat memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam politik (García-Castro et al., 2019). Keterlibatan politik yang dimaksud dalam hal ini tidak hanya melalui keterlibatan di dalam partai politik, tetapi juga dalam pemilihan representasi mereka pada lingkaran kekuasaan (Lesschaeve, 2021).

Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua konsep ini bersifat kompleks dan non-linier. Ketimpangan di satu sisi dapat menjadi ancaman serius terhadap kualitas dan ketahanan demokrasi, tetapi di sisi lain demokrasi tidak secara inheren mengurangi ketimpangan (Bahamonde & Trasberg, 2021; Zulkarnaen, 2017). Dalam konteks arah hubungan yang berbeda, (Dorsch & Maarek, 2020) menunjukkan bahwa semakin besar ketimpangan pendapatan, maka semakin besar pula kemungkinan suatu wilayah untuk mengalami perbaikan demokrasi.

Selain penelitian-penelitian di atas, beberapa penelitian mengenai hubungan demokrasi dan ketimpangan pendapatan di antaranya dilakukan (Sánchez-Ancochea, 2020) yang mengidentifikasi peran demokrasi, kesetaraan politik, dan populasi pribumi berpengaruh pada ketimpangan pendapatan; dan (Dorsch & Maarek, 2019) yang melakukan pengamatan sederhana bahwa

autokrasi yang heterogen mengarah pada hasil distribusi yang cukup ekstrem (juga egaliter) yang mengarah pada ketimpangan. Di Indonesia demokrasi mengalami pasang surut sejak era reformasi sampai saat ini (Liddle, 2021; Nur, 2019).

Bagaimanapun, sejumlah penelitian yang dilakukan terkait dengan kedua konsep ini tidak secara detail mengamati aspek-aspek yang memengaruhi tingkat demokrasi. Oleh karena itu kajian ini berupaya menjelaskan bagaimana hubungan konsep tersebut secara lebih detail, dengan mengangkat masalah Indeks Demokrasi Indonesia dan menganalisis pengaruh Indeks Demokrasi melalui ketiga aspeknya (Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, dan Lembaga Demokrasi) terhadap Ketimpangan Pendapatan diukur dengan Indeks Gini Indonesia pada 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2009 sampai 2019. Disagregasi indeks demokrasi dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keterkaitan kebebasan sipil, hak politik dan kelembagaan demokrasi dengan ketimpangan pendapatan, sehingga dapat diformulasikan kebijakan yang tepat untuk mengatasi ketimpangan pendapatan di Indonesia.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metoda statistika. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel dengan *cross-section* di 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2009-2019. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian adalah variabel dependen yakni Indeks Gini (IG) dan variabel independen yang terbagi ke dalam tiga aspek, yaitu Kebebasan Sipil (KS), Hak-Hak Politik (HP), dan Lembaga Demokrasi (LD). Adapun untuk menganalisis determinan ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2009 sampai dengan 2019 digunakan analisis inferensia berupa analisis regresi data panel dengan kemungkinan model yang terbentuk yakni *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Setelah melakukan pemilihan model, dilanjutkan dengan pengujian struktur matriks varians-kovarians residual menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM) untuk mengetahui apakah residual bersifat homoskedastis atau heteroskedastis. Apabila residual bersifat heteroskedastis maka dilakukan uji lamda

kovarians residual menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM) untuk mengetahui apakah residual bersifat homoskedastis atau heteroskedastis. Apabila residual bersifat heteroskedastis maka dilakukan uji lamda Lagrange Multiplier ( $\lambda$ LM) yang digunakan untuk melihat apakah ada *cross-sectional correlation* antar residu atau tidak. Jika dalam struktur matriks kovarian bersifat heteroskedastis dan terdapat *cross section correlation* maka estimasi yang digunakan adalah *Feasible Generalized Least Square/Seemingly Unrelated Regression* (FGLS/SUR) sehingga untuk pengujian asumsi klasik hanya memerlukan pengujian normalitas yang menggunakan Jarque-Bera dan multikolinearitas menggunakan matriks korelasi. Selanjutnya dilakukan uji kelayakan model yaitu dengan

melihat koefisien determinasi, pengujian simultan dan pengujian secara parsial.

### Hasil dan pembahasan

#### A. Indeks Demokrasi Indonesia

Tabel 1. memuat data-data IDI menurut Provinsi tahun 2009 & 2019 yang diurutkan berdasarkan indeksnya dari yang terkecil sampai yang terbesar, di mana dalam rentang waktu tersebut terlihat dinamika perubahan Indeks Demokrasi di berbagai provinsi. Sebagian di antaranya mengalami peningkatan dari yang moderat sampai signifikan, yang menandai perbaikan iklim demokrasi di provinsi-provinsi tersebut, sementara di sebagian lainnya masih mengalami penurunan.

**Tabel 1. Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2009 & 2019**

No.	PROVINSI	IDI 2009	PROVINSI	IDI 2019
1.	Nusa Tenggara Barat	58,12	Papua Barat	57,62
2.	Sumatera Utara	60,20	Sulawesi Tenggara	65,21
3.	Sumatera Barat	60,29	Papua	65,25
4.	Sulawesi Selatan	61,48	Sumatera Utara	67,65
5.	Jawa Timur	62,49	Sumatera Barat	67,69
6.	Papua Barat	63,06	Maluku	68,22
7.	Papua	63,80	Jawa Barat	69,09
8.	Sulawesi Tenggara	64,29	Jambi	69,76
9.	Bengkulu	64,76	Maluku Utara	69,89
10.	Sulawesi Tengah	66,02	Sulawesi Selatan	70,58
11.	Aceh	66,29	Lampung	72,56
12.	Jawa Tengah	66,45	Banten	72,60
13.	Kalimantan Selatan	66,63	<b>INDONESIA</b>	<b>74,92</b>
14.	Kepulauan Bangka Belitung	67,01	Riau	75,21
15.	Maluku Utara	67,21	Gorontalo	76,29
16.	<b>INDONESIA</b>	<b>67,30</b>	Nusa Tenggara Barat	76,64
17.	Lampung	67,47	Kepulauan Bangka Belitung	76,75
18.	DI Yogyakarta	67,55	Sulawesi Utara	77,08
19.	Banten	67,98	Jawa Tengah	77,22
20.	Sulawesi Barat	67,99	Sulawesi Tengah	77,27
21.	Maluku	69,07	Sulawesi Barat	77,42
22.	Bali	70,35	Kalimantan Barat	77,66
23.	Sulawesi Utara	70,94	Kalimantan Timur	77,67
24.	Jambi	71,00	Jawa Timur	77,68
25.	Jawa Barat	71,07	Aceh	78,00
26.	Nusa Tenggara Timur	71,64	Bengkulu	78,79
27.	Kalimantan Timur	72,31	Sumatera Selatan	78,96
28.	Kalimantan Barat	72,38	Kalimantan Selatan	79,47
29.	Sumatera Selatan	72,52	DI Yogyakarta	80,67
30.	Gorontalo	73,50	Nusa Tenggara Timur	81,02
31.	Kepulauan Riau	73,61	Kalimantan Tengah	81,16
32.	DKI Jakarta	73,91	Bali	81,38
33.	Riau	75,85	Kepulauan Riau	81,64
34.	Kalimantan Tengah	77,63	Kalimantan Utara	83,45
35.	Kalimantan Utara	-	DKI Jakarta	88,29

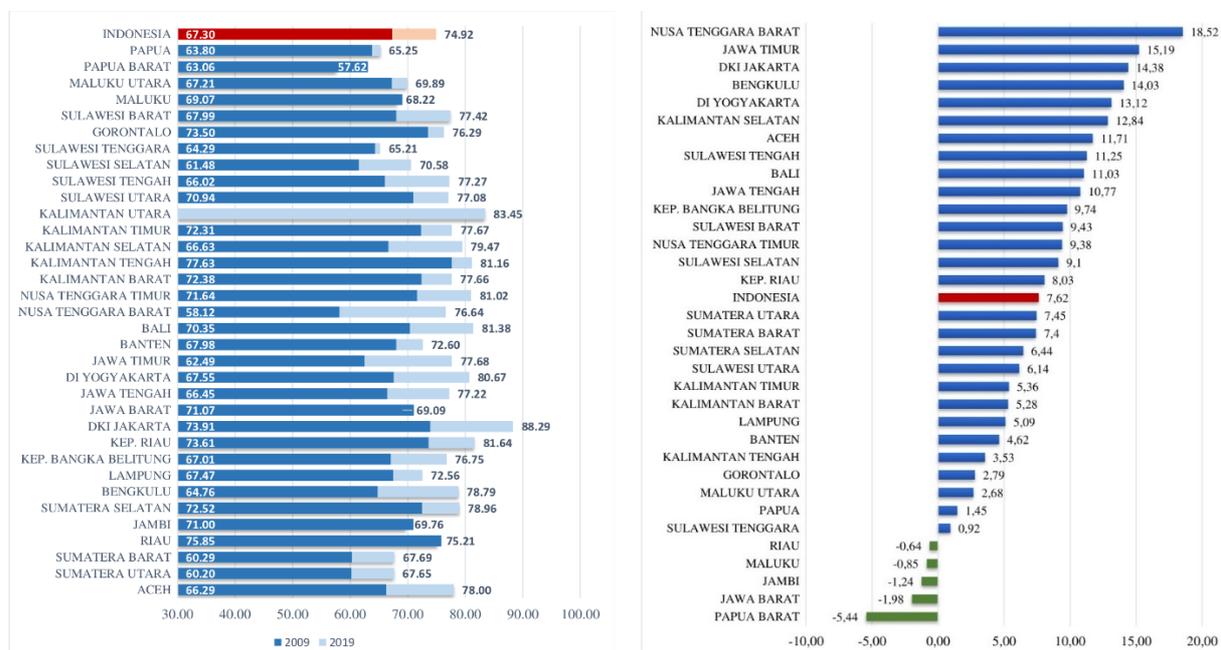
Sumber: BPS RI (2021), diolah

Pada tahun 2009 Indeks Demokrasi nasional berada pada angka 67,30 yang menempatkan Indonesia pada tingkat demokrasi “sedang”. Pada tahun 2019, angka ini sudah mencapai 74,92, yang berarti telah terjadi peningkatan angka indeks sebesar 7,62. Meskipun demikian, peningkatan ini masih menempatkan Indonesia di posisi yang sama, yaitu tingkat demokrasi sedang, karena indeks pada tahun 2009 mendekati batas bawah kriteria tingkat demokrasi tersebut.

Pada tahun 2009 hanya ada 1 provinsi (3,03%) yang diklasifikasikan memiliki tingkat demokrasi buruk, yaitu provinsi Nusa Tenggara Barat; sedangkan 32 provinsi lainnya (96,93%) termasuk dalam klasifikasi tingkat demokrasi sedang; tidak ada provinsi yang masuk dalam klasifikasi tingkat demokrasi baik. Indeks Demokrasi tertinggi dicapai oleh berturut-turut provinsi: Kalimantan Tengah (77,63), Riau (75,85), dan DKI Jakarta (73,91). Indeks Demokrasi yang lebih rendah dari Indeks Demokrasi nasional (67,30), diperoleh 18 provinsi (54,55%), dan sisanya sebanyak 15 provinsi (45,45%) memiliki pencapaian Indeks Demokrasi yang lebih baik dari Indeks Demokrasi nasional. Jika pada tahun 2009 tidak ada satu pun

provinsi di Indonesia yang mencapai tingkat demokrasi baik, maka pada tahun 2019 posisi ini sudah mampu dicapai oleh sejumlah provinsi.

Pada tahun 2019, masih ada 1 provinsi (2,94%) yang diklasifikasikan memiliki tingkat demokrasi buruk, yaitu provinsi: Papua Barat; 26 provinsi (76,47%) termasuk dalam klasifikasi tingkat demokrasi sedang; dan 7 provinsi lainnya (20,59%) termasuk dalam klasifikasi tingkat demokrasi baik. Indeks Demokrasi tertinggi dicapai oleh berturut-turut provinsi: DKI Jakarta (88,29), Kalimantan Utara (83,45), dan Kepulauan Riau (81,64). Indeks Demokrasi yang lebih baik dari Indeks Demokrasi nasional (74,92), dicapai oleh 22 provinsi (64,71%), sedangkan sisanya sebanyak 12 provinsi (35,29%), memiliki performa Indeks Demokrasi yang lebih rendah dari Indeks Demokrasi nasional. Jika dibandingkan dengan target IDI 2019 dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 75,00, sebanyak 27 provinsi (79,41%) berhasil melampaui target tersebut, sementara 7 provinsi lainnya (20,59%) belum berhasil. Secara nasional target itu juga sudah dilampaui, di mana Indeks Demokrasi nasional pada tahun 2019 adalah 78,46.



Sumber: BPS RI (2021), diolah

Grafik 1. Perubahan Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2009 – 2019

Grafik 1. memperlihatkan bahwa dalam rentang waktu antara tahun 2009-2019 terjadi peningkatan Indeks Demokrasi yang cukup signifikan di 28 provinsi di Indonesia (84,85%), sementara di 5 provinsi lainnya (15,15%) terjadi penurunan.

Provinsi yang mengalami peningkatan paling signifikan adalah provinsi: Nusa Tenggara Barat (+18,52), Jawa Timur (+15,19), dan DKI Jakarta (+14,38). Sebanyak 10 provinsi bahkan mengalami peningkatan Indeks Demokrasi di atas angka 10.

Peningkatan Indeks Demokrasi Provinsi DKI Jakarta yang signifikan mengantar provinsi ini berada pada posisi puncak, dengan tingkat demokrasi baik (88,29). Provinsi lainnya yang mengalami perbaikan tingkat Demokrasi dari tingkat demokrasi sedang menjadi baik adalah provinsi: DI Yogyakarta (80,67), Nusa Tenggara Timur (81,02), Kalimantan Tengah (81,16), Bali (81,38), Kepulauan Riau (81,64), dan Kalimantan Utara (83,45). Meskipun provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan peningkatan Indeks Demokrasi yang paling signifikan hanya bisa membawa provinsi ini dari tingkat demokrasi buruk ke tingkat demokrasi sedang. Sedangkan peningkatan Indeks Demokrasi yang signifikan di

Provinsi Jawa Timur tidak mengubah posisi tingkat demokrasi provinsi tersebut dan tetap berada di tingkat demokrasi sedang.

Provinsi yang mengalami penurunan Indeks Demokrasi adalah provinsi: Riau (-0,64), Maluku (-0,85), Jambi (-1,24), Jawa Barat (-1,98), dan Papua Barat (-5,44). Meskipun demikian penurunan ini hanya mengubah posisi Provinsi Papua Barat dari tingkat demokrasi sedang menjadi buruk. Hal yang sama tidak terjadi untuk provinsi: Riau, Maluku, Jambi, dan Jawa Barat yang tetap berada pada tingkat demokrasi sedang.

Tabel 2. memuat data Indeks Demokrasi Indonesia menurut aspek pada tahun 2009 & 2019.

Tabel 2. Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek Tahun 2009 & 2019

Provinsi	IDI Menurut Aspek dan Provinsi					
	Aspek Kebebasan Sipil		Aspek Hak-hak Politik		Aspek Lembaga Demokrasi	
	2009	2019	2009	2019	2009	2019
DI Aceh	64,42	93,28	70,39	65,22	62,13	79,08
Sumatera Utara	84,16	72,54	41,26	61,59	60,14	71,12
Sumatera Barat	63,06	56,58	53,57	61,06	67,48	92,21
Riau	93,14	85,15	65,40	61,68	70,68	84,19
Jambi	95,86	76,67	50,41	64,63	72,43	69,21
Sumatera Selatan	95,42	80,54	56,07	81,95	69,83	72,23
Bengkulu	94,26	93,98	54,03	73,17	44,70	68,63
Lampung	90,57	78,46	51,81	63,70	63,27	79,22
Kepulauan Bangka Belitung	96,51	84,12	48,29	71,71	59,65	75,48
Kepulauan Riau	96,22	92,66	59,47	78,30	67,62	73,10
DKI Jakarta	91,65	91,01	52,20	83,86	86,09	91,89
Jawa Barat	85,84	65,16	68,48	71,15	56,61	70,75
Jawa Tengah	86,48	78,43	51,85	67,91	64,43	90,50
DI Yogyakarta	92,15	92,90	52,52	72,51	60,48	78,25
Jawa Timur	83,30	72,14	50,96	80,25	54,64	80,55
Banten	95,46	83,83	49,47	60,29	62,83	78,01
Bali	93,97	90,60	49,82	68,38	73,24	90,42
Nusa Tenggara Barat	68,05	78,36	47,50	66,14	62,48	91,16
Nusa Tenggara Timur	95,55	93,97	51,46	78,58	73,63	68,62
Kalimantan Barat	98,29	92,59	53,46	71,45	69,85	68,74
Kalimantan Tengah	98,45	86,31	60,50	78,24	78,69	79,32
Kalimantan Selatan	68,24	68,01	62,63	86,52	70,95	82,67
Kalimantan Timur	98,22	88,50	54,78	66,27	67,57	82,17
Kalimantan Utara	-	96,60	-	74,92	-	80,46
Sulawesi Utara	92,23	95,19	58,50	63,54	63,91	75,82
Sulawesi Tengah	98,51	96,19	45,90	53,21	57,14	91,68
Sulawesi Selatan	82,94	68,32	42,36	65,61	64,88	81,34
Sulawesi Tenggara	94,66	80,31	43,97	52,18	58,37	66,90
Gorontalo	96,05	75,17	56,39	76,93	72,32	76,70
Sulawesi Barat	93,82	81,58	53,09	70,22	59,15	83,60
Maluku	92,77	87,06	52,05	55,62	66,30	64,55
Maluku Utara	93,61	85,61	46,30	64,86	67,23	58,11
Papua Barat	93,14	70,35	37,09	50,31	66,48	53,23
Papua	92,83	93,08	43,84	51,16	58,97	52,61

<b>INDONESIA</b>	<b>86,97</b>	<b>77,20</b>	<b>54,60</b>	<b>70,71</b>	<b>62,72</b>	<b>78,73</b>
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Sumber: BPS RI (2021), diolah

Terlepas dari alasan teoritis yang kuat di mana demokratisasi diharapkan mampu menyetarakan distribusi pendapatan (Scheve & Stasavage, 2017), studi empiris yang ada tidak menemukan pengaruh signifikan secara statistik dari demokratisasi terhadap ukuran ketimpangan pendapatan. Hal ini terlihat pada distribusi dan diferensiasi angka Indeks Demokrasi yang berbeda untuk masing-masing provinsi ini.

Meskipun demikian, faktor akuntabilitas demokrasi dipandang mampu mengurangi kemiskinan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, dan membantu mengurangi ketimpangan pendapatan (Hassan et al., 2021).

Hal ini juga memberikan indikasi bahwa ada faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan dalam upaya menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan, misalnya pendidikan (Lundberg et al., 2017), preferensi politik dan bias partisan (Muhtadi & Warburton, 2020).

Terkait dengan aspek demokrasi, (Miljkovic, 2018) menyatakan bahwa kehadiran kebebasan politik dan institusi memiliki dampak yang signifikan terhadap kebebasan individu. Di antara ketiga aspek demokrasi di Indonesia, aspek kebebasan sipil memiliki performa yang terbaik di banding dua aspek lainnya. Performa ini juga terlihat merata di seluruh provinsi dengan pengecualian hanya di beberapa provinsi.

Aspek hak-hak politik merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan negara. Sering kali terjadi warga negara tidak dapat menggunakan hak politik dasar mereka karena berbagai faktor terkait dengan kondisi ekonomi, misalnya pendidikan dan penyediaan layanan kesehatan yang tidak memadai. Tabel 2 menunjukkan performa yang cukup memprihatinkan terkait aspek ini. Bagaimanapun, pengurangan ketimpangan seharusnya dapat dilakukan dengan inklusi sosial sebagai instrumen efektif untuk mengurangi ketimpangan (Krasota & Melnyk, 2020), di mana semua anggota masyarakat diberikan hak yang sama mengenai akses ke semua sumber daya (Suaib et al., 2020) dan dalam perubahan ekonomi, sosial, dan politik.

Di antara ketiga aspek demokrasi, secara umum terlihat bahwa performa aspek lembaga demokrasi juga cukup rendah dibandingkan aspek-aspek lainnya, meskipun secara teoritis aspek ini memiliki peran untuk membantu

mengurangi kemungkinan dampak sumber daya terhadap ketimpangan pendapatan (Hartwell et al., 2019). Dalam kaitan dengan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi, Lipps & Schraff (2021) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan menurunkan kepercayaan seseorang pada institusi nasional dan dengan demikian mengurangi efek positif dari kepercayaan nasional pada kepercayaan publik. Meskipun literatur ekonomi politik sejauh ini belum sepakat tentang pengaruh institusi politik terhadap ketimpangan pendapatan, hasil penelitian (Zuazu, 2021) menemukan bukti kuat bahwa distribusi kekuatan politik secara de facto sangat besar pengaruhnya terhadap ketimpangan pendapatan.

## B. Indeks Gini Indonesia

Koefisien Gini (*Gini coefficient*) atau Indeks Gini adalah statistik ketimpangan ekonomi dalam masyarakat, yang memberikan gambaran dispersi pendapatan atau distribusi kekayaan di antara individu di dalam sebuah perekonomian.

Tabel 3 memperlihatkan Indeks Gini Indonesia menurut provinsi tahun 2009 & 2019. Berdasarkan aspek ini, terlihat Indeks Gini nasional mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu dari 0,367 menjadi 0,380, atau meningkat sebesar 0,013. Meskipun demikian, peningkatan ini tidak menyebabkan perubahan tingkat ketimpangan Indonesia dengan tetap berada di tingkat ketimpangan “sedang”.

Pada tahun 2009 terdapat 5 provinsi (15,15%) dengan Indeks Gini yang lebih tinggi dari Indeks Gini Nasional (0,367), yaitu provinsi: Banten (0,369), DI Yogyakarta (0,376), Kalimantan Timur (0,379), Papua (0,383), dan Sulawesi Selatan (0,394). Data untuk provinsi Kalimantan Utara tidak tersedia, karena baru sesudah UU No. 20 Tahun 2012 Provinsi Kalimantan Utara resmi terbentuk sebagai provinsi ke 34 di Indonesia.

Pada tahun 2019 provinsi dengan Indeks Gini lebih tinggi dari Indeks Gini Nasional (0,410) adalah provinsi: DI Yogyakarta (0,428). Dari 34 provinsi, 2 provinsi (5,88%) memiliki tingkat ketimpangan berkategori rendah ( $IG < 0,3$ ), sisanya 32 provinsi (94,12%) memiliki tingkat ketimpangan berkategori sedang ( $0,3 < IG < 0,5$ ), dan tidak ada provinsi dengan tingkat ketimpangan berkategori tinggi ( $IG > 0,5$ ).

## Vol. 21 No. 2 Tahun 2022 | Hal. 53 – 64

Provinsi dengan tingkat ketimpangan berkategori rendah ( $IG < 0,3$ ) dicapai oleh provinsi: Sulawesi Utara (0,262), dan Gorontalo (0,292). Sedangkan 3 provinsi dengan tingkat ketimpangan sedang dan Indeks Gini tertinggi berturut-turut adalah provinsi: DI Yogyakarta (0,428), Gorontalo (0,410), dan Jawa Barat (0,398).

Dari data tersebut terlihat adanya ketimpangan yang cukup lebar antar berbagai daerah (*inter-regional disparity*), baik pada tahun 2009 maupun pada tahun 2019. Koefisien Gini memang bukan ukuran absolut dari pendapatan atau kekayaan suatu negara, melainkan hanya menggambarkan bagaimana pendapatan atau kekayaan di dalam perekonomian tersebar di antara penduduk.

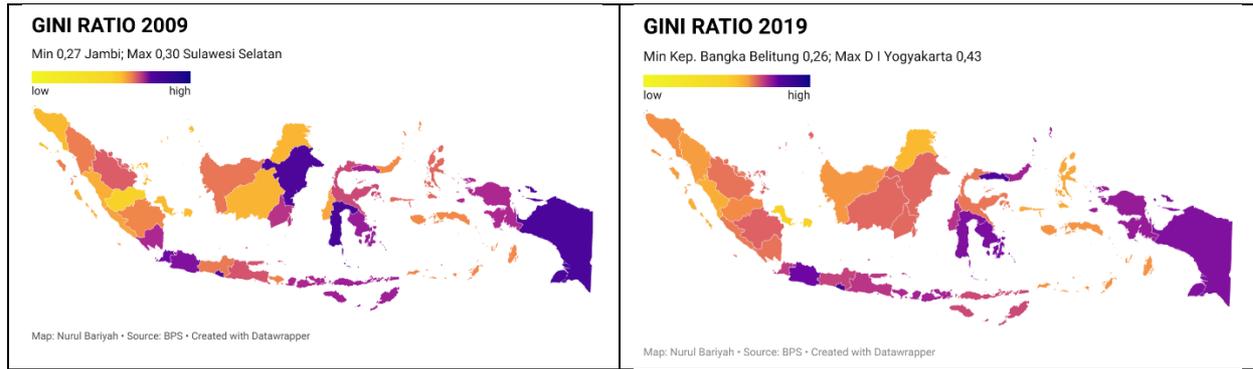
**Tabel 3. Indeks Gini Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2009 & 2019**

PROVINSI	IGI 2009	PROVINSI	IGI 2019
Jambi	0,269	Kepulauan Bangka Belitung	0,262
Kepulauan Riau	0,287	Kalimantan Utara	0,292
DI Aceh	0,288	Sumatera Barat	0,307
Kepulauan Bangka Belitung	0,288	Maluku Utara	0,310
Kalimantan Tengah	0,293	Sumatera Utara	0,315
Sumatera Barat	0,298	Kalimantan Barat	0,318
Sulawesi Barat	0,301	Maluku	0,320
Bengkulu	0,302	DI Aceh	0,321
Sulawesi Utara	0,311	Jambi	0,324
Maluku	0,312	Bengkulu	0,329
Sumatera Selatan	0,313	Sulawesi Tengah	0,330
Bali	0,315	Riau	0,331
Sumatera Utara	0,317	Lampung	0,331
Jawa Tengah	0,319	Kalimantan Selatan	0,334
Kalimantan Barat	0,321	Kalimantan Tengah	0,335
Maluku Utara	0,327	Kalimantan Timur	0,335
Riau	0,331	Kepulauan Riau	0,337
Jawa Timur	0,334	Sumatera Selatan	0,339
Sulawesi Tengah	0,338	Nusa Tenggara Timur	0,355
Kalimantan Selatan	0,348	Jawa Tengah	0,358
Lampung	0,353	Banten	0,361
Papua Barat	0,353	Jawa Timur	0,364
Nusa Tenggara Barat	0,354	Sulawesi Barat	0,365
Gorontalo	0,355	Bali	0,370
DKI Jakarta	0,356	Nusa Tenggara Barat	0,374
Nusa Tenggara Timur	0,357	Sulawesi Utara	0,376
Sulawesi Tenggara	0,359	<b>INDONESIA</b>	<b>0,380</b>
Jawa Barat	0,365	Papua Barat	0,381
<b>INDONESIA</b>	<b>0,367</b>	DKI Jakarta	0,391
Banten	0,369	Sulawesi Selatan	0,391
DI Yogyakarta	0,376	Papua	0,391
Kalimantan Timur	0,379	Sulawesi Tenggara	0,393
Papua	0,383	Jawa Barat	0,398
Sulawesi Selatan	0,394	Gorontalo	0,410
Kalimantan Utara	-	DI Yogyakarta	0,428

Sumber: BPS RI (2021), diolah

Ilustrasi sebaran dan perubahan Indeks Gini provinsi-provinsi di Indonesia pada tahun 2009 & 2019 diperlihatkan pada Gambar 1. di bawah ini.

Pada gambar terlihat perubahan warna dan gradasi yang mengilustrasikan perubahan Indeks Gini di masing-masing provinsi.

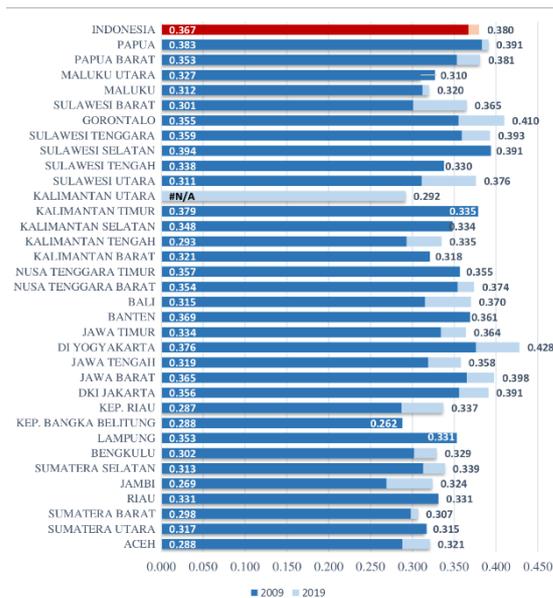


Sumber: BPS RI (2021), diolah

Gambar 1. Indeks Gini Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2009 & 2019

Grafik 2. menggambarkan besarnya perubahan Indeks Gini di masing-masing provinsi dari tahun 2009 ke tahun 2019. Grafik memperlihatkan dalam rentang waktu tersebut terjadi peningkatan Indeks Gini di sebagian besar provinsi di Indonesia yang menandai ketimpangan yang semakin melebar, yaitu di 22 provinsi (66,67%).

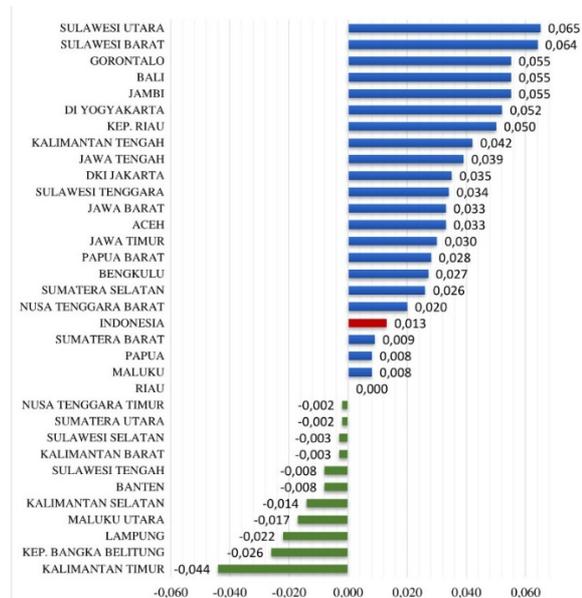
Sementara di 11 provinsi lainnya (33,33%) Indeks Gini mengalami penurunan, yaitu provinsi: Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Banten, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kalimantan Timur.



Sumber: BPS RI (2021), diolah

Grafik 2. Perubahan Indeks Gini Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2009 – 2019

Dari 11 provinsi yang mengalami penurunan Indeks Gini, atau dengan kata lain ketimpangan yang semakin mengecil dan kesetaraan yang lebih baik, Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan performa yang paling menonjol dalam upaya memperkecil ketimpangan di wilayahnya, dengan penurunan sebesar 0,044. Provinsi dengan penurunan Indeks Gini di atas 0,010 adalah: Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. Provinsi-provinsi: Banten, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat,



Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur juga menunjukkan tingkat ketimpangan yang menurun, meskipun tidak signifikan.

Untuk beberapa alasan, koefisien Gini dianggap belum tentu mencerminkan tingkat ketimpangan di Indonesia yang sebenarnya. Alasan tersebut di antaranya angka ketimpangan di Indonesia diukur dari angka pengeluaran rumah tangga, bukan angka pendapatan; representasi golongan kaya yang

kurang akurat, dan sampel data survei rumah tangga (Susenas) kurang mewakili golongan pendapatan tinggi

Selain itu, beberapa hal yang diduga memengaruhi tingginya rasio gini di beberapa provinsi ini di antaranya adalah kesempatan yang tidak sama (*unequal opportunity*) bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan dan kesehatan, pendapatan tenaga kerja yang tidak seimbang antara pekerja formal dan pekerja informal, dan distribusi kekayaan yang tidak merata.

### C. Analisis Statistik

Hasil uji model persamaan regresi ini adalah:

1. Uji LM Breusch Pagan: *Random Effect Model* (REM).
2. Uji Chow: *Fixed Effect Model* (FEM).
3. Uji Hausman: *Fixed Effect Model* (FEM).

Dengan demikian pendekatan model terbaik yang digunakan untuk menganalisis determinan ketimpangan pendapatan terkait dengan demokrasi di Indonesia tahun 2009 sampai dengan 2019 adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 4 berikut menunjukkan hasil estimasi Regresi Berganda data dengan jumlah observasi di 34 provinsi di Indonesia selama periode 2009 – 2019. Hasil regresi dengan model *Fixed Effect Model* (FEM), yaitu teknik estimasi data panel dengan menggunakan data *cross section* menghasilkan kesimpulan:

1) Variabel independen Kebebasan Sipil (AKS), Hak-Hak Politik (AHP), dan Lembaga Demokrasi (ALD) berpengaruh positif terhadap Indeks Gini Indonesia. Peningkatan indeks variabel independen akan diikuti oleh peningkatan Indeks Gini.

2) Nilai  $\beta_0 = 0.162775$  dapat diartikan bahwa apabila semua variabel independen (Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik, dan Lembaga Demokrasi) dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan, maka Indeks Gini adalah sebesar 0.162775.

3) Nilai  $\beta_1 = 0.001298$  dapat diartikan bahwa ketika Kebebasan Sipil meningkat sebesar 1 indeks, maka Indeks Gini mengalami peningkatan sebesar 0.001298 dengan asumsi Indeks Gini tetap.

4) Nilai  $\beta_2 = 0.000340$  dapat diartikan bahwa ketika Hak-Hak Politik meningkat 1 indeks, maka Indeks Gini juga meningkat sebesar 0.000340 dengan asumsi Indeks Gini tetap.

5) Nilai  $\beta_3 = 0.000944$  dapat diartikan bahwa ketika Lembaga Demokrasi naik 1 indeks, maka Indeks Gini mengalami kenaikan sebesar 0.000944 dengan asumsi Indeks Gini tetap.

6) Nilai  $R^2 = 0.804777$  dapat diartikan bahwa variabel independen mampu menjelaskan pengaruhnya sebesar 80,47% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

7) Nilai Prob = 0.000000 dapat diartikan bahwa variabel independen secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen secara signifikan, dilihat dari nilai Prob (Fstatistik) yang memiliki nilai kurang dari 0,05.

**Tabel 4. Hasil Regresi *Fixed Effect Model***

Variabel Dependen: Indeks Gini	<i>Fixed Effect Model</i>	<i>Standard Error</i>
Konstanta	0.162775	0.012688
LOGAKS	0.001298	0.000162
LOGAHP	0.000340	0.000129
LOGALD	0.000944	0.000164
$R^2 = 0.804777$	$F_{\text{statistik}} = 38.58975$	Probabilitas = 0.000000

Pada estimasi *Fixed Effect Model* berikut (Tabel 5), terlihat bahwa adanya pengaruh *cross-section* di setiap provinsi terhadap Indeks Gini di Indonesia. Hanya ada 14 provinsi yang memiliki pengaruh efek *cross-section* (efek wilayah operasional) yang bernilai positif, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta,

Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Papua Barat.

**Tabel 5. Nilai Koefisien Provinsi dengan *Fixed Effect Model***

PROVINSI	EFFECT	PROVINSI	EFFECT
1 Aceh	-0.022670	18 Nusa Tenggara Barat	0.033021
2 Sumatera Utara	-0.018399	19 Nusa Tenggara Timur	-0.018102
3 Sumatera Barat	-0.008184	20 Kalimantan Barat	-0.022028
4 Riau	-0.011354	21 Kalimantan Tengah	-0.039411
5 Jambi	-0.030291	22 Kalimantan Selatan	0.003827
6 Sumatera Selatan	-0.009818	23 Kalimantan Timur	-0.020618
7 Bengkulu	-0.002842	24 Kalimantan Utara	-0.122804
8 Lampung	-0.010502	25 Sulawesi Utara	0.013900
9 Bangka Belitung	-0.074687	26 Sulawesi Tengah	-0.010343
10 Kepri	-0.007118	27 Sulawesi Selatan	0.059647
11 Dki Jakarta	0.017076	28 Sulawesi Tenggara	0.041121
12 Jawa Barat	0.053988	29 Gorontalo	0.055585
13 Jawa Tengah	0.009398	30 Sulawesi Barat	-0.008571
14 Di Yogyakarta	0.043940	31 Maluku	-0.021975
15 Jawa Timur	0.026343	32 Maluku Utara	-0.032006
16 Banten	0.026612	33 Papua Barat	0.042493
17 Bali	0.004495	34 Papua	0.060277

Ini dapat diartikan bahwa ketika ketiga variabel independen (Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, dan Lembaga Demokrasi) meningkat, Indeks Gini justru mengalami peningkatan yang menandakan adanya ketimpangan yang semakin besar. Dengan kata lain, pada provinsi-provinsi ini perbaikan dalam iklim demokrasi justru memperbesar tingkat ketimpangan meskipun tidak terlalu signifikan.

Dari masing-masing provinsi tersebut, 3 daerah yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap peningkatan Indeks Gini Indonesia adalah Sulawesi Selatan (0,059647), Gorontalo (0,055585), dan Jawa Barat (0,053988). Sedangkan 3 daerah yang memiliki pengaruh terkecil terhadap peningkatan Indeks Gini adalah Kalimantan Selatan (0,003827), Bali (0,004495), dan Jawa Tengah (0,009398).

Sedangkan 20 provinsi lainnya memiliki efek *cross-section* (efek wilayah operasional) yang bernilai negatif, yaitu: DI Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa ketika ketiga variabel independen (Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik, dan Lembaga Demokrasi) meningkat, Indeks Gini justru mengalami penurunan sejalan dengan ketimpangan yang semakin kecil. Dengan kata lain, pada provinsi-

provinsi ini perbaikan dalam iklim demokrasi ikut memperkecil tingkat ketimpangan.

Dalam konteks ini 3 daerah yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap penurunan Indeks Gini Indonesia adalah Kalimantan Utara (-0,122804), Bangka Belitung (-0,074687), dan Kalimantan Tengah (-0,039411). Sedangkan 3 daerah yang memiliki pengaruh terkecil terhadap penurunan Indeks Gini adalah Bengkulu (-0,002842), Kepulauan Riau (-0,007118), dan Sumatera Barat (-0.008184).

Demokrasi bukanlah sistem yang sempurna. Terdapat berbagai sistem di dunia, dan demokrasi adalah salah satunya. Masing-masing sistem ini memiliki kelebihan dan kelemahannya. Namun demikian sistem demokrasi dianggap memiliki kelemahan yang lebih sedikit dibanding sistem lainnya. Perjalanan demokrasi Indonesia meskipun sudah cukup lama, namun belum terdapat perimbangan kekuatan eksekutif serta legislatif yang seyogyanya menjalankan fungsi masing-masing secara proporsional. Terdapat indikasi dominasi peran eksekutif dari waktu ke waktu (Basri, 2021).

### Simpulan

Temuan penelitian ini menunjukkan dukungan empiris bahwa kenaikan Indeks IDI tidak selalu mengakibatkan menurunnya ketimpangan pendapatan. Hal ini memberikan indikasi bahwa ada faktor-faktor lain yang juga perlu diperhatikan dalam upaya menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan, misalnya pendidikan,

preferensi politik dan bias partisan. Kenyataan yang demikian itu bagaimanapun akan sangat penting dalam rangka penyusunan teori hubungan IDI dan IGI yang lebih komprehensif.

Selain itu, terlepas dari alasan teoritis yang kuat di mana demokratisasi diharapkan mampu menyetarakan distribusi pendapatan faktor akuntabilitas demokrasi dipandang mampu mengurangi kemiskinan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, dan membantu mengurangi ketimpangan pendapatan.

Dengan demikian, teori-teori strukturalis baru seperti Boix, Acemoglu dan Robinson tidak terlalu didukung oleh bukti empiris. Hal ini mungkin sebagian dapat dijelaskan dalam kaitan masalah metodologi dan operasionalisasi variabel. Bagi peneliti temuan ini menjadi pendorong untuk mengkaji lebih dalam hubungan IDI dengan IGI serta melihat kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang juga berperan dalam upaya penurunan ketimpangan pendapatan.

#### Referensi

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2011). Persistence of Power, Elites, and Institutions. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.888187>
- Bahamonde, H., & Trasberg, M. (2021). Inclusive institutions, unequal outcomes: Democracy, state capacity, and income inequality. *European Journal of Political Economy*, 70. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2021.102048>
- Basri, F. (2021). Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi. <https://faisalbasri.com/2021/04/19/demokrasi-dan-pembangunan-ekonomi/>
- Boix, C. (2015). Democracy and redistribution. In *Democracy and Redistribution*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2722886>
- Dorsch, M. T., & Maarek, P. (2019). Democratization and the conditional dynamics of income distribution. *American Political Science Review*, 113(2). <https://doi.org/10.1017/S0003055418000825>
- Dorsch, M. T., & Maarek, P. (2020). Economic downturns, inequality, and democratic improvements. *European Journal of Political*

*Economy*.

<https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2020.101856>

- García-Castro, J. D., Willis, G. B., & Rodríguez-Bailón, R. (2019). I know people who can and who cannot: A measure of the perception of economic inequality in everyday life. *Social Science Journal*, 56(4). <https://doi.org/10.1016/j.soscij.2018.09.008>
- Goffe, N. V., & Monusova, G. A. (2019). Misperception of social realities: Political implications. *World Economy and International Relations*, 63(8). <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2019-63-8-91-101>
- Hartwell, C. A., Horvath, R., Horvathova, E., & Popova, O. (2019). Democratic Institutions, Natural Resources, and Income Inequality. *Comparative Economic Studies*, 61(4). <https://doi.org/10.1057/s41294-019-00102-2>
- Hassan, M. S., Mahmood, H., Saeed, M. I., Alkhateeb, T. T. Y., Arshed, N., & Mahmoud, D. H. I. (2021). Investment portfolio, democratic accountability, poverty and income inequality nexus in pakistan: A way to social sustainability. *Sustainability (Switzerland)*, 13(11). <https://doi.org/10.3390/su13116411>
- Krasota, O., & Melnyk, T. (2020). Social inclusion as an instrument for reducing socio-economic inequality. *Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration*, 28(3). <https://doi.org/10.46585/SP28031192>
- Lesschaeve, C. (2021). Bringing representatives back in: How political parties moderate patterns of inequality in opinion representation. *European Political Science*. <https://doi.org/10.1057/s41304-021-00332-y>
- Liddle, R. W. (2021). Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression? Thomas Power and Eve Warburton (eds.), Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2020, Pp. 393 + xvi, ISBN: 978-981-4881-51-7 (hard cover). *Asian-Pacific Economic Literature*, 35(1).

- <https://doi.org/10.1111/apel.12324>
- Lipps, J., & Schraff, D. (2021). Regional inequality and institutional trust in Europe. *European Journal of Political Research*, 60(4). <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12430>
- Lundberg, A. L., Huynh, K. P., & Jacho-Chávez, D. T. (2017). Income and Democracy: A Smooth Varying Coefficient Redux. *Journal of Applied Econometrics*, 32(3). <https://doi.org/10.1002/jae.2536>
- Maryanti. (2019). Ketimpangan, Demokrasi dan Kriminalitas di Indonesia. *Economics Bosowa*, 5(001), 45–58.
- Miljkovic, D. (2018). The Relationship between Individual and Institutional Freedom. *Open Journal of Political Science*, 08(02). <https://doi.org/10.4236/ojps.2018.82007>
- Muhtadi, B., & Warburton, E. (2020). Inequality and democratic support in Indonesia. *Pacific Affairs*, 93(1). <https://doi.org/10.5509/202093131>
- Nur, S. M. (2019). DEMOKRASI DAN TANTANGANNYA DALAM BINGKAI PLURALISME DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 19(01). <https://doi.org/10.21009/jimd.v19i01.12950>
- Sánchez-Ancochea, D. (2020). Beyond a single model: Explaining differences in inequality within Latin America. *Working Paper of the Helen Kellogg Institute for International Studies*, 2020(434).
- Scheve, K., & Stasavage, D. (2017). Wealth Inequality and Democracy. In *Annual Review of Political Science* (Vol. 20). <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-061014-101840>
- Suaib, E., Husein, N., & Santoso, D. (2020). Be Aware of Inequality: Political Challenges and Redistributive Public Policies. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 5(1). <https://doi.org/10.15294/ipsr.v5i1.21724>
- Zuazu, I. (2021). Electoral systems and income inequality: a tale of political equality. *Empirical Economics*. <https://doi.org/10.1007/s00181-021-02154-9>
- Zulkarnaen, I. (2017). Socio-Political and Economic Determinants of Income Inequality In Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 1(3), 224–239. <https://doi.org/https://doi.org/10.36574/jpp.v1i3.21>